

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transformasi digital dan tuntutan tata kelola pemerintah yang semakin terbuka mendorong transparansi dan akuntabilitas di berbagai lembaga negara saat ini, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, di mana secara normatif dan praktis pengelolaan informasi tersebut dapat ditelusuri dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan amanat dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa seluruh badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi dengan jelas, lengkap dan transparan kepada masyarakat umum.¹ Dapat dipahami bahwa setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi terkait aktivitas pemerintahan, pengambilan keputusan publik, serta penggunaan sumber daya negara. Hood tahun 2006 mengungkapkan keterbukaan secara luas diakui sebagai prinsip inti *good governance* karena memungkinkan warga negara untuk mengakses dan mengevaluasi informasi tentang kebijakan publik dan tindakan pemerintah. Tidak hanya menyediakan informasi, keterbukaan mensyaratkan bahwa informasi kebijakan disajikan dengan cara yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh warga negara untuk meneliti keputusan pemerintah.²

Keterbukaan informasi publik memiliki beberapa prinsip, di antaranya dalam perspektif *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi administrasi publik adalah komponen penting dalam mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan antara lembaga pemerintah dan

¹ Yuono, C. (2023). *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu*. Jurnal Pustaka Komunikasi, 6(2), 418-431. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>

² Asmianur, R., Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Andriansyah, A., & Awan, A. T. (2025). Utilization of Instagram as An Instrument of Public Policy Transparency: A Case Study of The Palangka Raya City Government. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 351-362. Diakses dari <https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i2.65.351-362>

masyarakat.³ Salah satu cara strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola birokrasi pemerintahan adalah melalui digitalisasi administrasi publik. Menempatkan sistem elektronik sebagai infrastruktur strategis yang menjadi penghubung utama antara mekanisme kerja internal birokrasi dan akses publik terhadap informasi. Digitalisasi administrasi publik memungkinkan jalur pengambilan keputusan lebih mudah ditelusuri dan diawasi. Akan tetapi, implementasinya sering kali tidak konsisten antarlembaga, terutama dalam sektor pendidikan tinggi yang memiliki kompleksitas kelembagaan tinggi, sedangkan keterbukaan informasi publik di ranah pendidikan tinggi menjadi krusial, mengingat lembaga ini mengelola sumber daya, kebijakan, serta keputusan akademik yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Dalam perspektif teoritis *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis⁴, kondisi tersebut relevan untuk menjelaskan peran pimpinan lembaga pendidikan dalam membangun tata kelola yang transparan serta berfokus pada kepentingan publik. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin atau pengelola bertindak sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kepercayaan, mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bentuk komitmen etis terhadap akuntabilitas publik.

Dalam praktiknya keterbukaan informasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari resistensi lembaga, lemahnya pengawasan, hingga keterbatasan sistem dokumentasi. Data empiris menunjukkan cita-cita tersebut masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan nyata keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan pada proses administrasi terjadi pada tahun 2025, ketika Jason Julian mengajukan permohonan data seleksi PPDS Ilmu Penyakit Dalam Universitas Brawijaya, meliputi Surat Keputusan panitia, dokumen penilaian, dan hasil ujian periode

³ Fadri, Z., & Fil, S. (2024). *Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik*. Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital, 61, 61-62.

⁴ Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. Australian Journal of management, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>

2023–2024.⁵ Sebagian dokumen ditolak permintaannya, sehingga sengketa ini dibawa ke Komisi Informasi Pusat. Putusan akhirnya menegaskan bahwa sebagian dokumen merupakan informasi publik yang harus dibuka karena menyangkut transparansi seleksi akademik. Kasus ini tidak hanya menggambarkan persoalan administratif semata, tetapi juga memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara keterbukaan dengan praktik institusional yang masih cenderung tertutup. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan praktik keterbukaan informasi kepada publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam budaya birokrasi lembaga. Diperlukan sebuah solusi sistemik yang secara konkret mampu mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Solusi tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi dan kebijakan tertulis, melainkan harus diwujudkan melalui penerapan sistem informasi yang terstruktur, transparan, dan dapat diakses oleh publik secara luas. Sistem yang dimaksud hendaknya mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan informasi dengan kapasitas lembaga dalam menyediakannya, sekaligus mendorong perubahan budaya birokrasi dari yang semula tertutup menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) merupakan salah satu sistem administrasi digital yang digunakan di lembaga Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains, yaitu sistem yang mentransformasikan tata naskah dinas konvensional menjadi berbasis elektronik, sehingga proses administrasi mulai dari korespondensi, penyusunan draf surat, disposisi, alur kerja, notulensi kegiatan serta penyimpanan dokumen dilakukan secara terintegrasi dan terdigitalisasi. SINDE diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan tata pemerintahan, khususnya melalui optimalisasi tata laksana administrasi serta penguatan integrasi pertukaran informasi dan data antarunit kerja secara efektif dan berkelanjutan.

⁵ Alin (2025). *KI Pusat Putuskan Sengketa Informasi Pemohon Jason Julian dan Universitas Brawijaya*. Komisi Informasi Pusat. Diakses pada 25 September 2025 dari <https://komisiinformasi.go.id/read/09/07/2025/KI-Pusat-Putuskan-Sengketa-Informasi-Pemohon-Jason-Julian-dan-Universitas-Brawijaya>

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai unit eselon II memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, serta memberikan dukungan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri, seperti perizinan, evaluasi, dan pelaporan dalam lingkup pendidikan tinggi. Termasuk yang mengelola kebijakan strategis, pendanaan penelitian, pengembangan riset serta tata kelola perguruan tinggi di Indonesia. Luasnya cakupan tugas sangat penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kerja, dan setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan berdampak langsung pada distribusi sumber daya dan kepentingan publik. Apabila informasi tidak dikelola dengan baik, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan dalam distribusi program, bahkan hilangnya kepercayaan publik. Di sinilah peran Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) menjadi penting.

SINDE berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan naskah dinas secara elektronik, mulai dari penyusunan, distribusi, hingga pengarsipan dokumen. Melalui sistem ini, setiap dokumen tidak hanya tersimpan dengan rapi, tetapi juga memiliki jejak digital yang memungkinkan prosesnya ditelusuri secara transparan. Keberadaan jejak digital tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan akuntabilitas, karena setiap keputusan dan kebijakan dapat diketahui alur prosesnya serta dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal.

Penerapan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) merupakan wujud konkret digitalisasi administrasi yang memberikan keunggulan dalam pengelolaan dokumen yang terintegrasi, tertelusur, dan efisien. Melalui SINDE proses pengelolaan naskah dinas dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Selain itu, berdasarkan studi literatur, SINDE memiliki dua fitur yang secara terbuka dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana alur pengelolaan dokumen naskah dinas yang sedang berlangsung. Penting untuk dipertanyakan sejauh mana peran SINDE dalam mendukung penyediaan informasi kepada publik mengingat Setditjen Dikti memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu

dilakukan untuk mendalami permasalahan yang dikaji terkait “Peran Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik pada Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi”. Hasil penelitian ini bukan hanya berkontribusi pada penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, tetapi juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik itu sendiri dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini difokuskan kepada Peran Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik pada Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun sub-fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peran SINDE dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pendidikan tinggi
2. Peran SINDE dalam mendukung transparansi tata kelola pendidikan tinggi
3. Manfaat dan tantangan implementasi SINDE
4. Implikasi SINDE terhadap peningkatan mutu tata kelola pendidikan tinggi.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian serta fokus dan sub-fokus penelitian ini maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dikaji pada saat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran SINDE dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pendidikan tinggi?
2. Bagaimana transparansi SINDE dalam keterbukaan informasi publik?
3. Bagaimana manfaat dan tantangan dari implementasi SINDE?
4. Bagaimana implikasi SINDE terhadap peningkatan mutu tata kelola pendidikan tinggi?

D. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tata kelola pendidikan tinggi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana SINDE berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi publik sehingga dapat memperkuat digitalisasi administrasi publik, meningkatkan efektivitas manajemen administrasi lembaga serta memastikan pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini didasarkan pada manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan, dan pengelolaan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam perspektif *good governance* melalui kajian mengenai penerapan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE). Sistem SINDE dapat dipahami sebagai instrumen digital yang berperan sebagai perantara antara prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keterbukaan informasi publik di lingkungan lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga dapat dioperasionisasikan melalui sistem administrasi digital seperti SINDE. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai digitalisasi administrasi publik dengan menunjukkan bagaimana sistem elektronik mampu menjadi mekanisme pendukung terciptanya keterbukaan informasi yang efektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada pihak-pihak berikut:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan beberapa manfaat praktis, antara lain:

- 1) Menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai peran implementasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam mendukung keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan Setditjen Dikti.
- 2) Melatih kemampuan analisis kritis terhadap hubungan antara digitalisasi administrasi dan keterbukaan informasi publik.
- 3) Memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji praktik tata kelola administrasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, sehingga menjadi bekal akademik maupun profesional di masa depan.

b. Bagi Prodi Manajemen Pendidikan FIP UNJ

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi Program Studi Manajemen Pendidikan FIP UNJ dalam memperkaya kajian dan referensi mengenai penerapan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam keterbukaan informasi pada tata kelola pendidikan tinggi. Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan rujukan bagi mahasiswa maupun dosen dalam mengembangkan pemahaman tentang digitalisasi administrasi, keterbukaan informasi publik melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam manajemen pendidikan tinggi. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat mendukung penguatan kurikulum, khususnya pada mata kuliah yang terkait dengan manajemen perkantoran, sistem informasi manajemen, dan kebijakan pendidikan, sehingga relevan dengan kebutuhan perkembangan dunia pendidikan tinggi di era digital.

c. Bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya di unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pertama, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi terhadap efektivitas peran SINDE dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada tata kelola pendidikan tinggi. Kedua, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai manfaat dan kendala implementasi SINDE, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun sumber daya manusia. Ketiga, penelitian ini dapat mendukung upaya reformasi birokrasi dengan memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi melalui pengembangan SINDE di masa depan. Diharapkan, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang selaras dengan prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dengan menunjukkan bagaimana penerapan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pendidikan tinggi. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap data dan kebijakan pendidikan sehingga tercipta kepercayaan serta partisipasi aktif dalam pengawasan kinerja lembaga. Selain itu, penelitian ini juga membantu masyarakat memahami pentingnya digitalisasi administrasi pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan bebas dari praktik yang tidak transparan. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan publik dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas.